

## 4 Bangunan Bertingkat di Ciampea Dibongkar Satpol PP

CIAMPEA (IM) - Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar empat bangunan berlantai dua yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini bagian dari penegakan peraturan daerah (Perda) nomor 11 tahun 2012.

“Hari ini setelah sebelumnya memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3, akhirnya kami melakukan penegakan Perda yaitu membongkar bangunan yang tak ber-IMB,” ucap Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho kepada wartawan, Rabu (9/6).

Pria yang juga Ketua Kwardcab Kabupaten Bogor ini menerangkan Muhammad Irfan pemilik bangunan sudah mengurus IMB, namun karena tidak memiliki alas hak akhirnya bangunan tersebut tidak diterbitkan IMB-nya.

“Bangunan milik Mu-

hammad Irfan tidak ber-IMB karena berdiri di atas lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) Perumahan Taman Drama Pratama di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea,” terangnya.

Ketua RT 01 RW 05 Perumahan Taman Drama Permai, Baginda Parlaungan menjelaskan sejak tahun 2020 lalu ia sudah mengingatkan bahwa lahan di atas bangunan yang didirikan Muhammad Irfan adalah lahan fasos dan fasum.

“Bangunan tak ber-IMB ini berdiri sejak tahun 1998 dan sudah lama kami ingatkan bahwa lahan tersebut adalah fasos dan fasum Perumahan Taman Drama Permai. Setelah tak ada itikad baik akhirnya kami melakukan pengaduan di Tahun 2020 lalu,” jelas Baginda. ● **gio**

## Bima Arya Bangga Digitalisasi Aksara Sunda Dimulai di Bogor

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya mengaku bangga karena upaya-upaya untuk mendigitalisasikan aksara Sunda dimulai dari Bogor melalui simposium yang diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Hujan itu awal pekan ini.

“Ini adalah ikhtiar awal, saya bangga karena ini dimulai di Bogor. Bukan di tempat lain, karena di sinilah ibu kota Kerajaan Pakuan Pajajaran lima abad yang lalu. Bukan di Bandung, bukan di Bekasi, bukan di Tangerang,” kata Bima Arya, kemarin.

Simposium Digitalisasi Aksara Sunda yang berlangsung secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kota Bogor dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Digitalisasi aksara Sunda merupakan upaya melestarikan budaya daerah.

“Statement yang disampaikan Pak Wali Kota menurut saya cukup berani dan patut diapresiasi. Saya menganggap ini sebagai sebuah sinyal baik keseriusan dukungan Pemkot Bogor untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam mendigitalisasikan aksara Sunda dan bukan sekadar retorika politis semata,” kata Ketua Bidang Pengembangan Bisnis, Kerjasama dan Marketing PANDI, Heru Nugroho.

Heru mengatakan, dalam proses pendaftaran aksara sunda menuju go

digital, dibutuhkan semacam peraturan pemerintah yang secara spesifik menyebutkan bahwa memang aksara daerah tersebut diatur dan tertuang dalam sebuah peraturan.

Dalam mendaftarkan sebuah aksara ke tingkat dunia, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa aksara tersebut diatur dalam peraturan yang berlaku di negara tersebut.

“Dalam hal ini aksara Sunda sudah mempunyai modal yang cukup karena Kota Bogor sudah mempunyai Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik, sebagai dasar acuan untuk proses selanjutnya,” jelas Heru.

Di tempat terpisah, Ketua PANDI, Yudho Giri Sucahyo mengapresiasi para narasumber yang terlibat pada gelaran Simposium Digitalisasi Aksara Sunda tersebut. Menurutnya simposium itu merupakan inovasi pelestarian aksara daerah khususnya aksara Sunda supaya bisa masuk ke dunia digital.

“Saya berterima kasih dan berharap dengan adanya simposium aksara Sunda, bisa menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan aksara Sunda ke depannya, sehingga estafet literasi aksara bisa diteruskan pada generasi selanjutnya. Dengan demikian, digitalisasi ini bisa lebih memudahkan berbagai hal mulai dari pendidikan hingga kebutuhan praktis dalam pemanfaatan aksara Sunda,” kata Yudho menambahkan. ● **gio**

## Perda Tibum Penanganan Pandemi Bogor Diminta Ditegakkan

BOGOR (IM) - Kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan yang signifikan setelah munculnya kluster perumahan dan pondok pesantren, dan terparahnya tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kayumanis.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) terkait penanganan pandemi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyampaikan, saat ini Kota Bogor telah memiliki Perda Tibum yang mengatur penanganan pandemi.

Mulai dari langkah penanganan hingga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar.

Sehingga ia pun meminta Pemkot Bogor untuk menegakkan perda tersebut untuk menekan angka penyebaran dan mencegah munculnya kluster baru.

“Pertama kita berharap Pemkot Bogor betul-betul menegakkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Tibum. Karena disitu jelas dikatakan tentang penanganan pandemi,” kata Endah, kemarin.

Setelah munculnya kluster baru ini, Endah menuturkan, ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Bogor mulai mengalami peningkatan. Bahkan dari

catatannya, keterisian kasur di RSUD Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.

Sehingga ia pun meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.

“Tingkat awareness masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya,” tegasnya.

Terkait dengan adanya kluster pesantren dan puskesmas, Endah sendiri mengaku sudah meminta pihak Dinkes agar melakukan tracing dan PCR swab test secara masif. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di Griya Melati.

“Saya menunggu kabar lanjutan dari Kadinkes, karena katanya sudah dilakukan masif tracing sampai pengunjung yang sempat datang ke puskesmas. Karena tadi sudah saya tanyakan langsung bagaimana dengan pengunjung yang datang ke puskesmas, apakah sudah dilakukan PCR swab test tapi katanya sedang dilakukan masif tracing,” pungkasnya. ● **gio**

# 8 | Nusantara



## PROYEK KOLAM RETENSI ANDIR

Foto udara proyek pembangunan Kolam Retensi Andir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/6). Proyek pembangunan kolam retensi di lahan seluas 4,85 hektare yang dapat menampung air hingga 137.500 meter kubik tersebut ditujukan untuk menanggulangi banjir luapan Sungai Citarum serta ditargetkan akan rampung pada Desember 2021 mendatang.

# Kadisdik Jabar: Tahun Ini Ada Perbedaan PPDB dengan Tahun Sebelumnya

Ada penambahan zonasi, yang bertujuan untuk mengakomodasi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan kabupaten/kota. Seperti di Kabupaten Subang. Dari 3 zonasi pada tahun lalu, menjadi 5 zonasi pada tahun ini. Kota Depok dari 1 zonasi sekarang 11 zonasi.



DEDI SUPANDI  
Kadisdik Pendidikan Jabar

BANDUNG (IM) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menjelaskan, ada sejumlah perbedaan antara Penerimaan sebagai koordinator dan bertanggung jawab pada sistem dan pemantauan,” tuturnya, dalam suatu percakapan, di Bandung Rabu (9/6).

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah I-XIII menjadi Ketua Panitia PPDB. Selain itu, ada penambahan zonasi dan penyertaan sekolah swasta dalam sistem pendaftaran.

“Desentralisasi kewenangan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan, pengaduan mulai di tingkat satuan pendidikan hingga KCD. Kami tetap berperan sebagai koordinator dan bertanggung jawab pada sistem dan pemantauan,” tuturnya, dalam suatu percakapan, di Bandung Rabu (9/6).

Dikatakan, penambahan zonasi, bertujuan untuk mengakomodasi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan kabupaten/kota. Ambil contoh di Kabupaten Subang. Dari 3 zonasi pada tahun lalu, menjadi 5 zonasi pada tahun ini. “Kota Depok dari 1 zonasi sekarang 11 zonasi,” katanya.

Dedi memaparkan, dengan proyeksi lulusan SMP negeri dan swasta tahun 2021 sebanyak 777.506 siswa, SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar hanya mampu menampung 41,5 persen siswa. Rinciannya, SMAN 163.728 siswa, SMKN (113.112), dan SLBN (3.708).

Oleh karena itu, penyertaan sekolah swasta dalam proses pendaftaran PPDB 2021 dilakukan. Nantinya, peserta didik yang mendaftar pada PPDB 2021 tidak hanya memilih sekolah negeri, tetapi juga harus memilih sekolah swasta.

“Jadi swasta menjadi sebuah pilihan, pilihan pertama negeri dan yang terakhir boleh

memilih swasta. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini menjadi sebuah agenda yang semakin baik untuk pelaksanaan PPDB tahun ini,” ucapnya.

Pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB di Jabar pada tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan berlangsung pada 7-11 Juni 2021 untuk jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.

“Yang afirmasi 20 persen, prestasi 25 persen dan perpindahan orang tua 5 persen. Yang tergolong afirmasi adalah keluarga tidak mampu dan kondisi tertentu. Kondisi tertentu di dalamnya ada tenaga Kesehatan, disabilitas dan korban bencana,” kata Dedi.

“Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Juni – 1 Juli 2021. Itu full seluruhnya zonasi. Jadi 50 persen ditahap pertama dan 50 persen di tahap kedua,” tambahnya.

PPDB SMA/SMK/SLB di Jabar Tahun 2021 memiliki tagline Sekolah di mana saja sama. Menurut Dedi, tagline tersebut dibuat untuk memberikan pemahaman kepada

calon peserta didik dan orang tua siswa bahwa mau negeri ataupun swasta, semuanya sama.

“Kita hari ini tidak lagi mengenal istilah ada sekolah favorit dan nonfavorit. Semuanya sama. Karena yang terpenting adalah bagi anak bagaimana pendidikan membentuk sebuah karakter pribadi anak menjadi lebih baik,” katanya.

Selain itu, Dedi mendorong seluruh calon peserta didik dan orang tua siswa untuk mempelajari petunjuk teknis (juknis) PPDB 2021 yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Juknis PPDB 2021.

“Sehingga, apa pun jalur pendaftaran yang dipilih, peserta didik sudah tahu persyaratan apa saja yang harus disiapkan,” ucapnya.

Guna kelancaran PPDB tahun ini, Disdik Jabar bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama serta Disdik kabupaten/kota, kata Dedi. ● **Iys**

## Dua Kades Paparkan Programnya ke Wartawan Pokja Kab. Bogor

BOGOR (IM) - Untuk mengukur program Pancakarsa, dua Kades yakni Kades Tarikolot dan Kades Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Selasa (8/6), di sekretariat Wartawan Pokja Kabupaten Bogor, memaparkan capaian pelaksanaan program Pancakarsa di desanya.

Kades Tarikolot, H.Kurniawan memaparkan, program Pancakarsa merupakan bagian terpenting dari tahapan pembangunan besar, yang menjadi acuan setiap program pemerintah daerah.

Apalagi program tersebut merupakan program Bupati Bogor, Ade Yasin dan wakil bupati Wawan Setiawan yang menjadikan ini sebagai program prioritas di Pemkab Bogor.

“Kami sebagai aparat pemerintahan desa tentu sangat konsen terhadap pelaksanaan program “Pancakarsa” merupakan tema besar pembangunan Kabupaten Bogor.

Sebab, program Pemerintah Kabupaten Bogor adalah program yang sangat baik, yakni lima program/Karsa Cerdas, Karsa Sehat, Karsa Maju, Karsa Membangun, Karsa Beradab, kata Kurniawan menjelaskan.

Kelima program Pancakarsa, khususnya di desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, seperti karsa cerdas, dengan melakukan berbagai program kegiatan di antaranya mendorong masyarakat untuk ikut program paket A, paket C bagi masyarakat desa yang sempat putus sekolah, dan diharapkan kedepannya masyarakat bisa mengakses pekerjaan di perusahaan perusahaan. Dengan demikian, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan terhadap keluarganya, katanya.

Hal yang sama disampaikan Kades Hambalang, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Wawang Sudarwan.

Dalam kesempatan tersebut dia menyampaikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pancakarsa di desanya, antara lain program/karsa membangun.

Pemerintahan Desa Hambalang saat ini tengah melaksanakan pembangunan stadion Hambalang.

“Meskipun pengerjaan secara bertahap, mudah-mudahan bisa terwujud. Untuk itu kami berharap dukungan dari semua pihak,” ujar Wawang.

Selain tengah membangun Stadion Hambalang, aparat pemerintahan Desa Hambalang juga tengah giat mengoptimalkan kegiatan yang menarik wisatawan berkunjung ke Hambalang, karena di Desa Hambalang banyak terdapat objek wisata.

Wawang berharap, dengan banyaknya potensi wisata yang ada di Desa Hambalang, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. ● **jai/gio**

## Kakek 83 Tahun Ditemukan Tewas di Kolam Ikan

BOGOR (IM) - Seorang kakek berinisial DM (83), ditemukan tewas di kolam ikan di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (9/6) pagi.

Kapolsek Bogor Barat, Kompol Sahroni mengatakan, temuan mayat itu berawal ketika ada warga melintas di area kolam ikan sekira pukul 06.00 WIB. Ketika itu, terlihat jasad korban berada di dalam kolam.

“Korban meninggal di kolam ikan dalam posisi celana tersangkut ke besi di dinding kolam sedangkan badan tengkurap kepala masuk ke dalam air kolam,” kata Sahroni, saat dikonfirmasi.

Warga pun melaporkan temuan tersebut ke polisi.

Dari hasil olah tempat kejadian sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dari keterangan para saksi-saksi dan barang bukti sementara disimpulkan korban meninggal dunia akibat jatuh ke kolam. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,” jelasnya.

Kemudian, didapati keterangan dari keluarga bahwa korban memang sudah pikun. Bahkan sering keluar pada malam hari tanpa diketahui pihak keluarga dan beberapa kali tidak pulang ke rumah.

“Penyelidikan lebih lanjut dilaksanakan untuk memastikan sebab kematian,” tutup Sahroni. ● **gio**

## Ketua DPRD Kab. Bogor, Dapat Apresiasi Populerkan Aksara Sunda

BOGOR (IM) - Usaha, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susanto mempopulerkan aksara Sunda mendapat apresiasi berbagai pihak.

Salah satunya dari Dewan Kesenian Kabupaten Bogor yang menilai Rudy Susanto telah membuat langkah awal dalam penciptaan aksara sunda yang berisikan narasi petuah bijak dengan kaidah desain grafis yang saat ini sudah dipamerkan di lobi utama gedung DPRD Kabupaten Bogor.

“Saya mengapresiasi beliau karena selain produk seni komunikasi berwujud visual aksara Sunda dan menjadikannya salah satu media pengingat kalau Kabupaten Bogor itu adalah bagian dari salah satu wilayah di tataran Sunda,” kata Sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, Bambang Irawan.

Menurut dia, Rudy Susanto telah mengangkat kebudayaan

lokal dan jati diri Sunda dan keluhuran nilai budaya yang sangat relevan untuk diterapkan bukan hanya di gedung DPRD saja, tapi ke pintu-pintu masuk dan gapura gapura di setiap SKPD dan Kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Harapannya tentu agar masyarakat Kabupaten Bogor hususnya memiliki kebanggaan dengan kebudayaan sendiri di era globalisasi dan pergaulan internasional saat ini,” jelas Bambang.

Sekadar diketahui Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susanto mempopulerkan aksara Sunda pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539 yang jatuh pada 3 Juni 2021 lalu.

Hal ini sebagai langkah awal mempopulerkan, aksara Sunda dalam narasi petuah bijak dengan kaidah desain grafis mulai dipamerkan di lobi utama Gedung DPRD sejak 3 Juni 2021, katanya. ● **gio**



## PEMBUKAAN PPDB SMA DI JABAR

Siswa dibantu gurunya mengikuti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di SMPN 2 Ciamis, Jawa Barat, Rabu (9/6). Dinas Pendidikan Jabar membuka tahapan pertama PPDB 2021 untuk tingkat SMA, SMK dan SLB, pada 7-11 Juni 2021 yang terdiri dari jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan zonasi, dengan proyeksi kelulusan SMP negeri dan swasta sebanyak 777.506 siswa.